BAB IV
PERBANDINGAN KONSEP NEGARA MENURUT PEMIKIRAN IMAM MAWARDI DENGAN ALI ABDUL RAZIQ

A. Persamaan Pemikiran Imam Mawardi dengan Ali Abdul Raziq tentang Konsep Negara

Dalam tulisan ini hampir semua pemikiran Imam Mawardi berbeda dengan pemikiran Ali Abdul Raziq tentang konsep negara, tetapi kedua tokoh ini masih mempunyai beberapa kesamaan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Imam Mawardi dan Ali Abdul Raziq, kedua tokoh ini sama-sama berani menyampaikan keputusan pada waktu ketika kondisi negara sedang mengalami kekacauan.
   a. Imam Mawardi misalnya adalah orang yang berani mempertahankan status quo, definisi status quo menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah: "Status quo berasal dari bahasa Latin, artinya keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya. Jadi, mempertahankan status quo berarti mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya".[1] Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, Kepala Negara dijabat oleh orang orang Quraysh termasuk khalifah al-Qadir pada masa Imam Mawardi. Dari sini tampak bahwa pemikiran Imam Mawardi

[1] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga.* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung mendukung status quo serta mempertahankan hegemoni Quraish. Lalu kenapa Imam Mawardi ingin mempertahankan status quo yang pada intinya adalah tetap menjadikan orang-orang Quraish sebagai Kepala Negara. Faktor-faktor penyebab Mawardi mempertahankan status quo adalah sebagai berikut:

1) Faktor psikologi

Secara psikologi maupun kodrati, setiap individu akan terbentuk oleh situasi dan kondisi lingkungan dimana ia hidup. Begitu juga karakter dan pemikiran Imam Mawardi sangat dipengaruhi oleh situasi politik pada masa itu. Konsep dasar hukum dan politik yang digagas oleh Imam Mawardi merupakan hasil dari sebuah pengalaman perjalanan hidupnya.

2) Faktor kekacauan dan gangguan stabilitas negara

Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan peradaban pada saat itu serta pemegang kendali yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam lambat laun meredup dan pindah ke kota-kota lain. Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus membagi kekuasaannya dengan panglimanya yang berkebangsaan Turki dan Persia, karena tidak mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas wilayahnya harus tunduk dan patuh kepada satu orang Kepala Negara.[2] Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai Kepala Negara yang bersifat formal. Sedangkan

[2] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta: UI Press, 1990), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan dan pelaksana pemerintah sebenarnya adalah para panglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki dan Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan melakukan pemberontakan, dan tuntutan agar selain dari keturunan Quraish orang bisa menduduki jabatan sebagai Kepala Negara.

3) Faktor posisi Mawardi sebagai aparat negara

Jabatan Mawardi saat itu adalah *Aqdi al-Quddah* (Hakim Agung) setelah menjadi hakim di beberapa daerah. Dengan adanya hukum dan aturan-aturan yang yang tegas dalam pemerintahan, diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif dan setiap rakyat akan patuh pada hukum dan aturan-aturan tersebut. Maka Mawardi memasukkan aturan hukum bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi Kepala Negara harus dari keturunan Quraish.

b. Ali Abdul Raziq menolak sistem khilafah, karena Ali Abdul Raziq beranggapan kalau suatu negara menerapkan sistem khilafah, maka negara tersebut akan terhambat kemajuannya, sehingga tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Ali Abdul Raziq juga beranggapan bahwa Islam tidak menerapkan sistem politik tertentu. Garis politik Ali Abdul Raziq bertentangan dengan upaya merealisasikan jabatan khalifah bagi raja Fuad di Mesir ketika itu. Selain faktor tersebut diatas masih ada faktor-faktor yang menyebabkan Ali Abdul Raziq menolak sistem khilafah, diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Faktor kedatangan barat

Semenjak kedatangan Napoleon di Mesir (1798 M) pada awal abad XIX,[3] modernisasi (pembaruan) telah memasuki dunia Islam. Dan tahap berikutnya dunia Islam mengadakan hubungan secara intensif dengan Barat melalui cara pengiriman pelajar ke Barat, serta mendatangkan tenaga ahli dari Barat untuk mengajar sekolah-sekolah di Mesir. Akibat hubungan dunia Islam dengan barat tersebut membawa perubahan dampak berbagai aspek kehidupan seperti, ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan sebagainya.

2) Faktor pendidikan

Pada tahun 1913 Ali Abdul Raziq berangkat ke Inggris untuk belajar di Universitas Oxford.[4] Di Universitas ini ia mempelajarai ilmu ekonomi dan ilmu politik. Ketika belajar di Inggris Ali Abdul Raziq banyak membaca dan mempelajari teori-teori Barat. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama belajar di Eropa berpengaruh besar terhadap pemikirannya, terutama rasionalitas dalam berfikir, dan kebebasan dalam berpendapat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran Ali Abdul Raziq tidak terlepas kaitannya dengan

[3] Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan...,* 311.
[4] Ali Abdul Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan Islam, terjemahan: Ahmad Tafsir*, (Bandung:Pustaka al-Husna, 1985)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan keagamaan dan sosial politik umat islam khususnya Mesir ketika itu.

Jadi letak persamaannya yaitu Imam Mawardi berani menyampaikan untuk mempertahankan status quo ketika situasi di Baghdad sedang kacau, banyak dari sebagian golongan melakukan pemberontakan, dan tuntutan agar selain dari keturunan Quraish orang bisa menduduki jabatan sebagai Kepala Negara. Dan pada masa Ali Abdul Raziq, di Mesir ketika itu tercapai konsensus yang mengatakan bahwa adanya kewajiban untuk melestarikan dan mempertahankan khilafah sebagai satu-satunya bentuk kerajaan Islam.

2. Pemikiran Imam Mawardi dan Ali Abdul Raziq sama-sama memberikan kontribusi positif bagi negara nya masing-masing. Mereka memberikan ide-ide yang brillian bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Contoh konkrit kontribusi positif yang diberikan oleh kedua tokoh ini adalah:
   a. Imam Mawardi memberikan kontribusi pemikiran berupa tata cara pengangkatan imam, kriteria imam, yang berhak memilih imam, cara pemilihan imam, kewajiban-kewajiban imam, pemecatan imam.
   b. Ali Abdul Raziq melakukan modernisasi yaitu bukan dengan kembali kepada ajaran lama, bukan menggunakan cara tradisional, tetapi dengan cara modern. Walaupun ketika itu sempat dikecam, meskipun demikian Ali Abdul Raziq hingga sekarang masih dikenang jasa-jasanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Imam Mawardi menyumbangkan ide-ide politiknya dalam bingkai Islam. Banyak gagasan yang ia tuangkan dalam bentuk buku terutama dalam ranah hukum dan politik sebagai upaya untuk mengatasi dan mengantisipasi kekacauan yang berkepanjangan. Salah satu buku karya Imam Mawardi adalah *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah.*

d. Ali Abdul Raziq menuangkan pemikirannya dalam buku *al-Islām Wa Uṣūl al-Ḥukm,* karyanya yang menyangkut tentang khilafah ini menjadi sangat populer hal ini disebabkan oleh isu khilafah yang dipadamkan oleh Mustafa Kemal dan adanya usaha keras dari para ulama untuk menghidupkan khilafah kembali, tetapi usaha itu tidak berhasil.

B. Perbedaan Pemikiran Imam Mawardi dengan Ali Abdul Raziq tentang Konsep Negara

Dari uraian di Bab II dan Bab III dapat kita telusuri beberapa perbandingan antara pemikiran Imam Mawardi dengan Ali Abdul Raziq tentang konsep negara, kedua tokoh ini mempunyai beberapa perbedaan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Imam Mawardi berpendapat sistem pemerintahan Islam ialah berbentuk khilafah. Ini dipengaruhi pada masa hidup Imam Mawardi sistem pemerintahan yang berlaku pada saat itu ialah berbentuk khilafah, yaitu pada masa bani Abassiyah.
2. Berbeda dengan Imam Mawardi, Ali Abdul Raziq mengartikan sistem pemerintahan yang dianut oleh umat Islam tidaklah harus berbentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekhalifahan, sistem politik dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, dimana ada saatnya suatu sistem politik menjadi lebih cocok, mainstream ideologi yang dianut suatu negara juga sangat menentukan sistem politik apa yang dipakai negara itu, tanpa harus merujuk barat sebagai orientasinya, Islam mengajarkan *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy'an al-munkar*, oleh karena itu hendaknya yang baiklah yang dipilih, bukan yang membawa kemudharatan.

3. Konsep pemerintahan yang ditawarkan oleh Imam Mawardi mendekati sistem demokrasi tidak langsung. Bisa dilihat dari pengangkatan imam atau khalifah, kriteria-kriteria atau syarat untuk menjadi kholifa, hingga tata cara pemilihan khalifah.
4. Sedangkan menurut Ali Abdul Raziq pemerintahan bukanlah pemerintahan agama, tetapi hanyalah pemerintahan yang menjalankan tugas duniawi, yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat.

Dari ulasan di atas penulis berpandangan bahwasannya, baik konsep yang ditawarkan Imam Mawardi dengan Ali Abdul Raziq sama-sama memiliki sisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi kelebihannya, jika negara menggunakan sistem sekuler, atau pemisahan urusan agama dan negara, peran yang diambil sebuah pemerintahan negara cenderung lebih terbuka, tanpa harus bergesekan dengan nilai-nilai agama. Dengan perannya yang relatif lebih terbuka, tanpa adanya intervensi dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan agama, maka negara akan lebih mudah membuat formulasi, inovasi bagi perkembangan dan kemajuan sebuah negara.

2. Dengan menerapkan sistem negara sekuler, maka akan lebih membuka ruang dialogis bagi tumbuhnya budaya-budaya lokal akibat terciptanya ruang dialogis yang relatif lebih terbuka.
3. Adapun dari sisi kelemahannya, jika pemisahan agama dan negara diterapkan menggunakan cara yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Ataturk, yaitu dengan menghapus total lembaga-lembaga Islam, maka akan menghapus corak budaya khas dunia timur, khususnya di Turki.
4. Misi agama yang sebenarnya sangat membutuhkan peran aktif negara, dalam hal ini pemerintah tidak bisa dioptimalkan akibat logis dari adanya pemisahan agama dan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id